

RISIKO KEBERLANJUTAN BAGI BANK DI ASIA TENGGARA

DAMPAK UNTUK PEMBUAT KEBIJAKAN

DAFTAR ISI

Penulis

Nur Maliki Arifiandi

Policy Engagement Manager, Forests

Helen Finlay

Global Senior Policy Manager, Forests

Ucapan Terima Kasih

Pietro Bertazzi

Global Director, Policy Engagement

Sareh Forouzesh

Associate Director, Forests

Tomasz Sawicki

Project Manager Forests

Norhani Khalit

Engagement Manager, Capital Market

Christian Lonnqvist

Manager, Financial Services

Joseph Power

Senior Manager, Sustainable Finance
Climate

Jordan McDonald

Senior Analyst, Financial Services

So Lefebvre

Senior Officer, Financial Services

03 **Kata Pengantar**

04 **Temuan utama**

05 **Pendahuluan**

06 **Lanskap Keuangan Berkelanjutan**

08 **Tindakan yang Dilakukan Bank Asia Tenggara terkait Risiko Iklim dan Hutan**

15 **Daftar Pustaka**

Pemberitahuan penting

Isi dalam laporan ini dapat digunakan oleh siapapun dengan mencantumkan CDP sebagai sumber informasi. Namun hak tersebut tidak termasuk untuk mengemas ulang serta menjual data apapun yang dilaporkan kepada CDP maupun para penulis yang berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Jika anda bermaksud untuk mengemas ulang maupun menjual salah satu isi dalam laporan ini, anda harus mendapatkan izin tertulis dari CDP terlebih dahulu.

CDP menyusun dan menganalisa data dalam laporan ini berdasarkan tanggapan atas permintaan informasi CDP Financial Services Climate Change and Forests Pilot 2020. Tidak ada representasi ataupun jaminan (tertulis maupun tak tertulis) dari CDP atas keakuratan ataupun kelengkapan informasi dan opini dalam laporan ini. Anda tidak boleh serta merta mengambil tindakan berdasarkan informasi dalam publikasi ini tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada pihak profesional. Sepanjang diizinkan oleh peraturan perundangan, CDP tidak menerima atau menanggung kewajiban, tanggung jawab, atau kewajiban apapun atas segala konsekuensi perbuatan anda maupun pihak lain, atau menahan diri untuk tidak melakukan tindakan dengan mengandalkan informasi dalam laporan ini, atau untuk segala keputusan yang diambil berdasarkan informasi pada laporan ini. Segala informasi dan pandangan yang diungkapkan oleh CDP dalam laporan ini berdasarkan pada penilaian saat laporan ini dibuat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan dikarenakan faktor ekonomi, politik, industri dan alasan khusus dari perusahaan. Komentar dari para kontributor yang dituangkan dalam laporan ini merupakan pandangan pribadi dari masing-masing penulis; pernyataan tersebut bukan merupakan dukungan dari mereka.

CDP, perusahaan atau perusahaan anggota afiliasinya, atau pemegang saham, anggota, mitra, kepala, direktur, pejabat dan/atau karyawan, mungkin memiliki sekuritas pada perusahaan yang disebutkan dalam laporan ini. Sekuritas perusahaan yang disebutkan dalam laporan ini mungkin tidak memenuhi syarat untuk diperjualbelikan di beberapa negara dan juga tidak cocok untuk semua jenis investor; nilai sekuritas dan pendapatan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan/atau dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang.

'CDP' merujuk kepada CDP North America, Inc, sebuah organisasi nirlaba dengan status yayasan sosial 501(c)3 di Amerika Serikat dan CDP Worldwide, dengan nomor pendaftaran yayasan sosial n 1122330 dan nomor pendaftaran perusahaan terbatas dengan jaminan dan terdaftar di Inggris dengan nomor 05013650.

© 2021 CDP. Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

KATA PENGANTAR



Pietro Bertazzi
Direktur Global,
Pelibatan Kebijakan

Tekanan yang memicu perubahan iklim dan kerusakan ekosistem, termasuk produksi komoditas yang merisikokan hutan secara tidak berkelanjutan, berkaitan erat dengan sistem keuangan yang ada saat ini. Baik Persetujuan Paris maupun Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 membahas perlunya penyalarsan kembali alokasi modal untuk mewujudkan agenda global yang ambisius, sehingga diperlukan adanya pelibatan yang efektif dengan lembaga jasa keuangan.

Bagi perusahaan-perusahaan yang berada dalam rantai pasok komoditas yang merisikokan hutan di Asia Tenggara, pinjaman bank merupakan bentuk pembiayaan paling penting, yakni meliputi 66% dari tahun 2010 hingga 2019¹.

Lembaga keuangan memiliki potensi yang signifikan untuk mempercepat terwujudnya praktik bisnis berkelanjutan di Asia Tenggara melalui kebijakan pinjamannya, serta melalui pelibatan perusahaan yang menerima pinjaman, investasi, dan asuransi. Pada tahun 2019, CDP mulai mengembangkan kerangka pelaporan untuk lembaga jasa keuangan yang pertama di dunia yang mencakup metrik perubahan iklim dan hutan. Kerangka kerja ini bertujuan membantu bank menilai dan meningkatkan pengelolaan risiko terkait hutan dalam portofolio pinjamannya dengan memberlakukan pelaporan tahunan. Asia Tenggara dijadikan lokasi uji coba kerangka ini karena merupakan kawasan penting dan habitat bagi spesies laut dan satwa liar².

Laporan kebijakan (policy brief) ini menganalisis tindakan yang diungkapkan oleh bank-bank di Asia Tenggara dan Global dalam kuesioner Percontohan CDP terkait Perubahan Iklim & Hutan 2020. Dokumen ini ditujukan bagi regulator keuangan agar lebih memahami bagaimana kegiatan pemberian pinjaman bank dapat membentuk dan berdampak terhadap iklim dan deforestasi yang, pada gilirannya, akan menimbulkan risiko keuangan terhadap bank. Dokumen ini ditutup dengan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan dan memperkuat pelibatan bank-bank di Asia Tenggara dalam mengatasi risiko terkait iklim dan hutan.

Pietro Bertazzi
Direktur Global, Pelibatan Kebijakan

TEMUAN UTAMA

- 1 Regulasi dan reputasi merupakan risiko terbesar yang diidentifikasi oleh bank dalam penilaian terkait iklim dan hutan.
- 2 Rendahnya tingkat analisis dampak portofolio tentang risiko terkait hutan untuk bank global dan bank Asia Tenggara.
- 3 Baik bank global maupun bank Asia Tenggara memiliki skor yang sangat rendah dalam hal pengungkapan emisi portofolio yang tercakup dalam Scope 3 karena kurangnya kapasitas dan pedoman yang jelas.
- 4 Bank Asia Tenggara memiliki pelibatan yang minimal dengan para mitra dan pemasoknya dalam rantai nilai komoditas yang merisikokan hutan.

Pada analisis ini, kami mendefinisikan 'bank Asia Tenggara' sebagai bank yang berkantor pusat di wilayah Asia Tenggara, sedangkan 'bank Global' merujuk pada bank di luar wilayah Asia Tenggara. Laporan ini menyoroti penyesuaian antara analisis utama dengan platform yang ada, misalnya Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan terkait Iklim (Task Force on Climate-related Financial Disclosure/"**TCFD**"), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.51/2017 (P.OJK No.51/2017), Prinsip Perbankan yang Bertanggung Jawab (Principles for Responsible Banking), Kerangka Penilaian Dampak Intermediasi Keuangan dan Investasi Berbasis Nilai (Value-based Intermediation Financing and Investment Impact Assessment Framework/"**VBIAF**") dari Bank Negara Malaysia (BNM), Panduan tentang Pengelolaan Risiko Lingkungan (Guidelines on Environmental Risk Management) dari Otoritas Keuangan Singapura (Monetary Authority of Singapore/"**MAS**"), dan Kinerja Perbankan Berkelanjutan (Sustainable Banking Assessment/"**SUSBA**").

PENDAHULUAN

Perubahan iklim diperkirakan akan mengungkung ekonomi di masa mendatang. Sejak Persetujuan Paris 2015, risiko dan peluang yang akan ditimbulkan oleh perubahan iklim telah dibahas di berbagai pertemuan dewan perusahaan dan lingkungan pemerintah paling berpengaruh di dunia³. Pembatasan kenaikan suhu global hingga di bawah 1.5°C membutuhkan upaya dekarbonisasi mendalam, terutama penghentian deforestasi. Hal ini sudah jelas karena, meskipun semua emisi antropogenik lain dihapus secara bertahap, deforestasi yang tengah terjadi saat ini (*business as usual*) secara terus-menerus dapat mendorong pemanasan global di atas 1.5°C pada tahun 2100⁴.

Asia Tenggara merupakan habitat bagi beberapa keanekaragaman hayati terkaya di dunia yang meliputi sekitar 20% dari total tumbuhan, hewan, dan spesies laut di dunia⁵. Hutan di wilayah ini mencakup satu dari tiga lanskap keanekaragaman hayati di dunia, selain wilayah Amazon di Amerika Selatan dan Kongo di Afrika. Namun, keanekaragaman hayati ini mengalami ancaman yang serius karena beberapa bagian di wilayah Asia Tenggara diperkirakan akan kehilangan 98% hutan yang tersisa dalam sembilan tahun ke depan⁶. Produksi pertanian komoditas yang merisikokan hutan adalah penyebab utama keanekaragaman hayati yang semakin berkurang, deforestasi, dan degradasi hutan di wilayah tersebut, sekaligus memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagian besar negara di Asia Tenggara.

Asia Tenggara juga merupakan salah satu pasar dengan perkembangan paling pesat di dunia. Pada tahun 2025, lebih dari separuh kelas konsumen dunia diprediksi akan tinggal di wilayah yang berjarak lima jam penerbangan ke Myanmar. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan populasi, permintaan akan komoditas yang merisikokan hutan meningkat dan kebutuhan akan modal untuk membiayai pertumbuhan dan memenuhi permintaan ini juga bertambah. Hal ini sekaligus menjadi suatu kekhawatiran karena Asia Tenggara juga merupakan wilayah dengan salah satu sistem keuangan yang paling menantang dan tidak transparan di dunia.

Tidak adanya pelaporan publik oleh sektor jasa keuangan di seluruh wilayah Asia Tenggara mengurangi kemampuan wilayah ini untuk mengadopsi dan menerapkan secara luas intervensi guna mengatasi deforestasi. Tanpa adanya gambaran jelas tentang siapa saja yang terlibat serta hal apa saja yang efektif dan tidak efektif, sektor ini akan tetap tidak memperoleh manfaat dari praktik terbaik, dan hampir tidak mungkin bagi regulator keuangan dan organisasi masyarakat sipil sulit untuk meminta pertanggungjawaban dari lembaga keuangan.



LANSKAP KEUANGAN BERKELANJUTAN

Laporan ini berfokus pada Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam rangka mendorong regulasi keuangan berkelanjutan yang baru dan lebih baik di wilayah ini. Ketiga negara ini berada di jantung produksi dan ekspansi kelapa sawit di Asia Tenggara, dengan Malaysia dan Indonesia yang memproduksi sekitar 85% dari total minyak sawit dunia⁷. Pada tahun 2018, minyak sawit adalah komoditas ekspor terbesar kedua Indonesia dan komoditas ekspor terbesar ketujuh Malaysia.

Lokasi Singapura yang strategis dan statusnya sebagai pusat keuangan (financial hub) di Asia Tenggara membuat banyak pekebun sawit dan perusahaan barang konsumen multinasional berbasis di negara kota tersebut. Dari 30 perusahaan perdagangan minyak sawit terbesar di dunia, ada delapan perusahaan berkantor pusat di Singapura dan tiga di antaranya⁸ mengendalikan 75% pengiriman volume minyak sawit di dunia⁹.

Ketiga negara ini telah mengesahkan Persetujuan Paris dan menentukan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contributions/NDC*) yang sejalan dengan komitmennya¹⁰. Dalam rangka memanfaatkan sektor keuangan untuk mendukung implementasi tujuan dari Persetujuan Paris, regulator keuangan dari ketiga negara ini pun bergabung dengan the Network for Greening the Financial System (NGFS)¹¹. Untuk informasi lebih lanjut, lihat penjelasan di bawah ini.

Indonesia

- ▶ Pada tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2014-2019). *Roadmap* (peta jalan) ini dirancang untuk mendukung prinsip pembangunan Indonesia 4P yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yakni memperhitungkan pertumbuhan (*pro-growth*), menyerap tenaga kerja (*pro-job*), mengurangi kemiskinan (*pro-poor*), dan memperhatikan lingkungan (*pro-environment*)^{12,13}.
- ▶ Roadmap OJK Tahap II (2020-2024) mencakup peningkatan fokus pada pengelolaan risiko keuangan, tata kelola perusahaan, peringkat keuangan bank, dan pengembangan sistem informasi pembiayaan berkelanjutan yang terpadu¹⁴.
- ▶ Meskipun belum ada pelibatan formal dengan TCFD di Indonesia, OJK secara aktif memberikan umpan balik kepada TCFD.
- ▶ Pada tahun 2017, OJK menerbitkan peraturan (P.OJK No.51/2017) bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik agar bank menerapkan strategi keuangan berkelanjutan. Komponen utama dari regulasi ini yaitu adanya persyaratan untuk menerbitkan laporan tahunan mengenai keberlanjutan bank yang dimulai sejak tahun 2020¹⁵.
- ▶ Pada tahun yang sama, peraturan No.60/POJK.04/2017 mengenai Panduan Penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) mewajibkan agar 70% dana hasil penerbitan obligasi (*proceeds*) digunakan untuk membiayai proyek hijau. Peraturan ini mendorong adanya transparansi untuk memverifikasi penerbitan obligasi hijau, yang mewajibkan emiten untuk melaporkan tinjauan kinerja yang diverifikasi secara independen¹⁶.
- ▶ OJK telah mengembangkan panduan teknis mengenai praktik pemberian pinjaman untuk energi bersih dan sektor kelapa sawit. Taksonomi Hijau diharapkan dapat digunakan pada tahun 2022¹⁷.

Malaysia

- ▶ Pada tahun 2014, Komisi Sekuritas Malaysia (*Securities Commission Malaysia/SCM*) memperluas cakupan Panduan Sukuknya¹⁸ agar meliputi kerangka sukuk untuk Investasi yang Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab (*Sustainable and Responsible Investment/SRI*) guna memfasilitasi terwujudnya ekosistem keuangan yang berkelanjutan bagi investor dan emiten SRI. Kerangka ini dibentuk untuk lebih mendukung posisi Malaysia sebagai pusat keuangan Islam. Kerangka ini mencakup persyaratan pengungkapan, pemantauan oleh pihak independen, dan persyaratan pelaporan¹⁹.
- ▶ Pada tahun 2019, Bank Negara Malaysia (BNM) membentuk Komite Bersama mengenai Perubahan Iklim (*Joint Committee on Climate Change/JC3*) untuk melaksanakan aksi kolaboratif dalam membangun ketahanan iklim di sektor keuangan Malaysia²⁰. JC3 terdiri dari empat sub-komite yang berfokus pada pengelolaan risiko, tata kelola dan pengungkapan, produk dan inovasi, serta pelibatan dan pengembangan kapasitas. Sub-komite tata kelola dan pengungkapan akan mengembangkan praktik terbaik terkait pengungkapan dan menjajaki kemungkinan untuk menerapkan standar yang ada, termasuk Rekomendasi TCFD²¹.

- ▼ Pada tahun 2019, BNM menyusun makalah mengenai 'Perubahan Iklim dan Taksonomi berbasis Prinsip (*Climate Change and Principle based Taxonomy*)' sebagai pedoman pemberian pinjaman terhadap sektor-sektor yang mendukung ekonomi rendah karbon. Makalah ini memiliki dua tujuan utama, yaitu (1) mengidentifikasi dan mengklasifikasi kegiatan ekonomi yang berkontribusi terhadap target perubahan iklim; (2) mengembangkan kapasitas dalam mengelola risiko keuangan akibat perubahan iklim. Versi perbaikan dari taksonomi ini direncanakan akan terbit di awal tahun 2021²².
- ▼ Pada tahun 2019, BNM juga menerbitkan *Value-Based Intermediation Financing and Investment Impact Assessment Framework-Guidance* (VBIAF). Dokumen ini mendorong pelaksanaan sistem pengelolaan risiko berbasis dampak untuk menilai kegiatan pembiayaan dan investasi lembaga keuangan Islam dengan menyertakan pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam sistem pengelolaan risikonya²³. Menyusul diterbitkannya panduan VBIAF, konsultasi publik untuk panduan sektor VBIAF terkait minyak sawit, energi terbarukan, dan efisiensi energi diselenggarakan di akhir tahun 2020²⁴.

Singapura

- ▼ Pada tahun 2016, Singapore Exchange Limited (SGX) menerbitkan aturan dan panduan yang mewajibkan perusahaan agar mengungkapkan dan menerbitkan laporan keberlanjutan tahunan demi meningkatkan pengungkapan dan transparansi perusahaan²⁵.
- ▼ Pada tahun 2019, MAS menerbitkan Rencana Aksi Keuangan Hijau yang berfokus dalam membangun ketahanan, mengembangkan pasar, memanfaatkan teknologi, dan mengembangkan kapasitas dalam keuangan berkelanjutan²⁶.
- ▼ Untuk mendukung penerbitan obligasi hijau, MAS telah mengembangkan skema hibah obligasi berkelanjutan. Melalui skema ini, pihak eksternal dapat meninjau biaya obligasi hijau yang diajukan²⁷.
- ▼ Pada bulan Desember 2020, MAS menerbitkan Panduan Pengelolaan Risiko Lingkungan bagi bank²⁸, pengelola aset²⁹, dan perusahaan asuransi³⁰, yang menetapkan praktik yang aman terkait tata kelola lembaga keuangan, pengelolaan risiko, dan pengungkapan risiko lingkungan yang dibuat bersama industri sebagai bagian dari Rencana Aksi Keuangan Hijau MAS. Kerangka risiko lingkungan ini sejalan dengan rekomendasi TCFD yang menyadari bahwa risiko fisik dan transisi berkaitan dengan perubahan iklim. MAS memutuskan untuk turut mencakup persoalan yang lebih luas tidak hanya terkait perubahan iklim, tetapi juga hilangnya keanekaragaman hayati, polusi, dan perubahan pemanfaatan lahan³¹.



TINDAKAN YANG DILAKUKAN BANK ASIA TENGGARA TERKAIT RISIKO IKLIM DAN HUTAN

Bagian ini menyajikan hasil keseluruhan yang bersifat anonim dari kuesioner CDP terkait Percontohan Perubahan Iklim & Hutan 2020.

Dari 42 bank target yang diundang, 24% di antaranya merespons, sehingga terdapat 10 sampel bank yang melakukan pengungkapan (tiga bank global dan tujuh bank di Asia tenggara, meski tidak ada bank dari Singapura yang merespons). Bank yang berpartisipasi merupakan pelaku penting di sektor keuangan, yang secara gabungan memiliki dana yang dipinjamkan sebesar lebih dari 2,5 triliun Dolar AS, dan menyumbang lebih dari 19% dari semua pinjaman yang diberikan kepada sektor komoditas yang merisikokan hutan di Asia Tenggara pada periode 2010-2018. Tingkat respons yang diperoleh sangat memuaskan mengingat adanya pandemi COVID-19 di dunia yang telah membuat sebagian besar kegiatan di banyak wilayah terhenti.



42
bank target yang diundang

3 bank global
7 bank di Asia tenggara

24%

di antaranya merespons, sehingga terdapat 10 sampel bank yang melakukan pengungkapan

19%

dari semua pinjaman yang diberikan kepada sektor

secara gabungan memiliki dana yang dipinjamkan sebesar

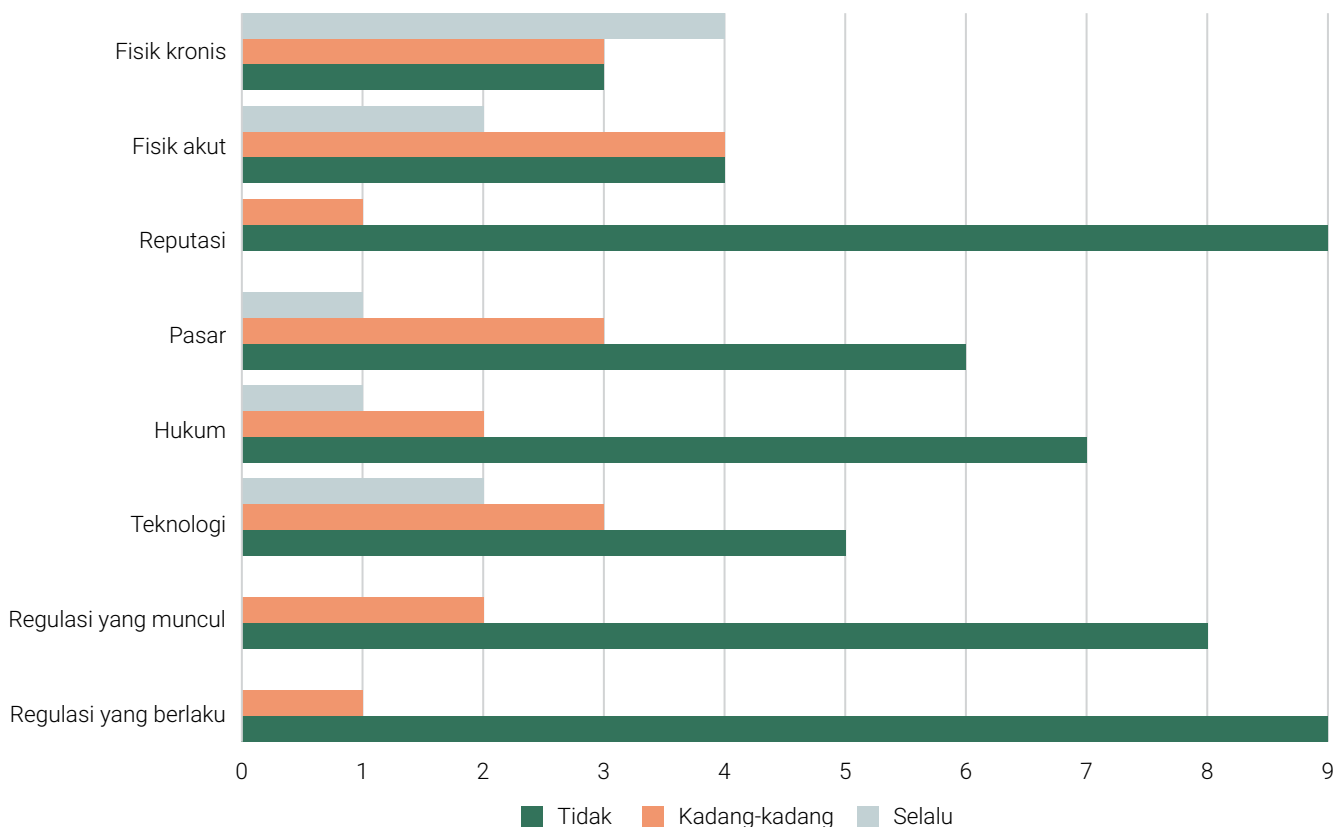
2,5 triliun Dolar AS



Pengelolaan Risiko

Sebagaimana diatur melalui TCFD, P.OJK No.51/2017, VBIAF BNM, dan Panduan Pengelolaan Risiko Lingkungan (*Environmental Risk Management Guidelines*) MAS, perusahaan perlu mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan. Data CDP menunjukkan bahwa dalam penilaian risikonya, bank lebih mempertimbangkan pemicu risiko yang berasal dari regulasi yang berlaku, regulasi yang muncul, dan reputasi dibandingkan risiko lain terkait hutan. Hal ini menunjukkan bahwa regulator memiliki pengaruh yang besar dan peran penting dalam menciptakan kondisi kebijakan yang ada untuk mengelola dan meminimalkan risiko terkait iklim dan hutan.

Gambar 1: Jenis Risiko yang dipertimbangkan bank dalam penilaian risiko terkait iklim dan hutan





Analisis Portofolio

Terdapat kesenjangan yang besar dalam hal transparansi di antara bank global dan bank Asia Tenggara. Semua bank global mengungkap dampak portofolionya terhadap iklim, sementara jumlah bank Asia Tenggara yang melakukan pengungkapan hanya 14%. Sebagai perbandingan, hanya 14% bank Asia Tenggara dan 33% bank global yang menganalisis keterpaparan portofolionya terhadap risiko terkait hutan.

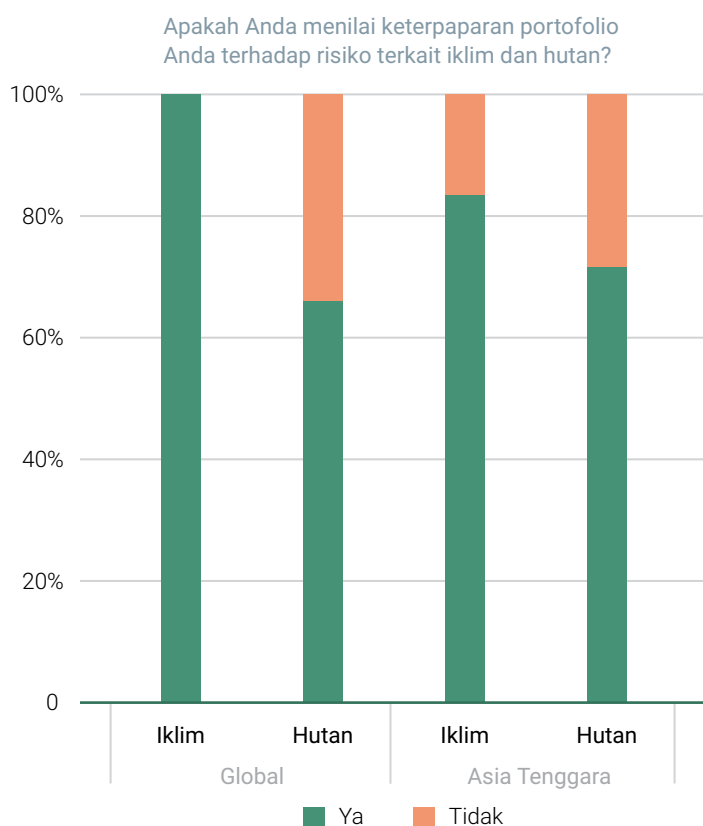
Selain itu, bank lebih cenderung untuk menilai risiko terkait iklim dan hutan terhadap portofolionya dibandingkan menilai dampak portofolionya terhadap iklim dan hutan. Perbedaan ini khususnya terlihat pada hutan, dan hal ini menunjukkan bahwa bank hanya berfokus pada satu sisi persamaan 'materialitas ganda'³².

TCFD, SUSBA, P.OJK no.51/2017, VBIAF oleh BNM, Panduan Pengelolaan Risiko Lingkungan (*Environmental Risk Management Guidelines*) oleh MAS, dan Prinsip Perbankan yang Bertanggung Jawab (*Principles for Responsible Banking*) menyoroti pentingnya sektor keuangan mempertimbangkan dampak potensial dari risiko terkait lingkungan dalam hal kegiatan pembiayaannya dan dampak terhadap portofolio pembiayaannya, termasuk portofolio peminjaman bagi bank.

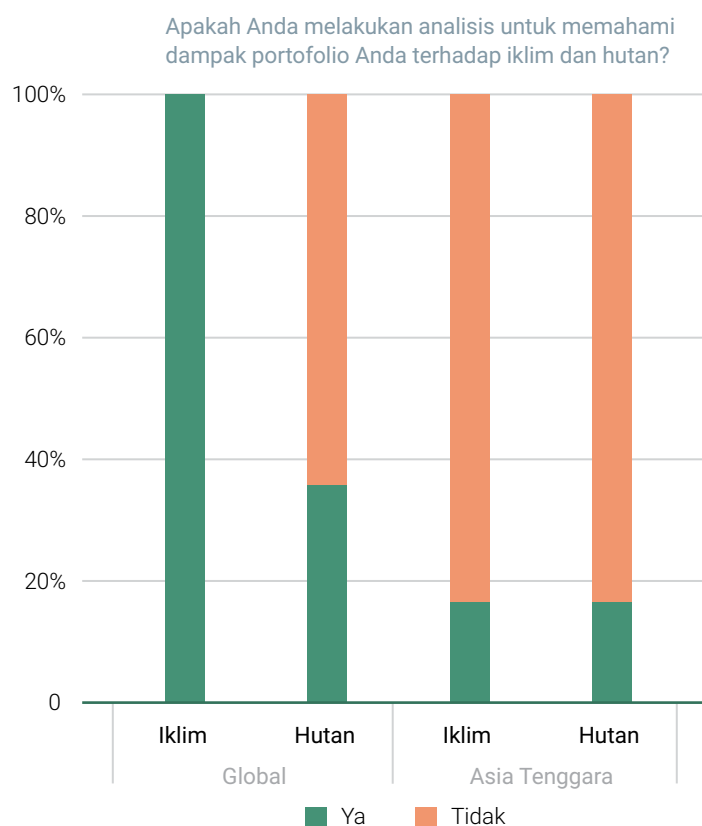
'Materialitas ganda' adalah pendekatan di mana persoalan dianggap material jika persoalan tersebut dapat memengaruhi perkembangan, kinerja, dan posisi perusahaan secara material, atau jika kegiatan perusahaan memiliki dampak material baik secara lingkungan maupun

sosial (European Commission, 2019). Konsep materialitas ganda secara tersirat terlihat dalam Kuesioner Percontohan Perubahan Iklim dan Hutan Jasa Keuangan CDP yang menanyakan penilaian bank atas keterpaparan portofolio terhadap risiko dan dampak portofolionya.

Gambar 2: Penilaian keterpaparan portofolio terhadap risiko terkait iklim dan hutan



Gambar 3: Analisis untuk memahami dampak portofolio terhadap iklim dan hutan

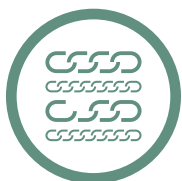




Emisi pada Portofolio yang Tercakup dalam Scope 3

Emisi yang tercakup dalam Scope 3 adalah hasil kegiatan dari aset yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi pelapor, sehingga merupakan emisi tidak langsung dalam rantai pasoknya^{33,34}. Pentingnya data emisi ini dipertegas melalui metrik dan target TCFD, Prinsip Perbankan yang Bertanggung Jawab (*Principles for Responsible Banking*) mengenai pengaturan target dampak, P.OJK No. 51/2017 mengenai kinerja lingkungan hidup bagi lembaga jasa keuangan, VBIAF oleh BNM mengenai pengukuran risiko berbasis dampak, dan Panduan Pengelolaan Risiko Lingkungan (*Environmental Risk Management Guidelines*) oleh MAS tentang identifikasi dan penilaian risiko serta pengelolaan dan pemantauan risiko.

Meskipun pengungkapan emisi pada portofolio yang tercakup dalam Scope 3 begitu penting, pelaksanaannya sangat terbatas, mengingat hanya ada satu bank global yang mengungkap emisi portofolionya. Hal yang tampaknya melatarbelakangi bank Asia Tenggara tidak melakukan pengungkapan adalah persoalan kapasitas, di mana bank belum memiliki alat untuk melakukan analisis mengenai dampak portofolionya terhadap iklim. Meskipun memiliki kapasitas yang lebih tinggi, bank global menyebutkan bahwa ketidakpastian metodologi emisi karbon adalah alasan mereka tidak melakukan pengungkapan.

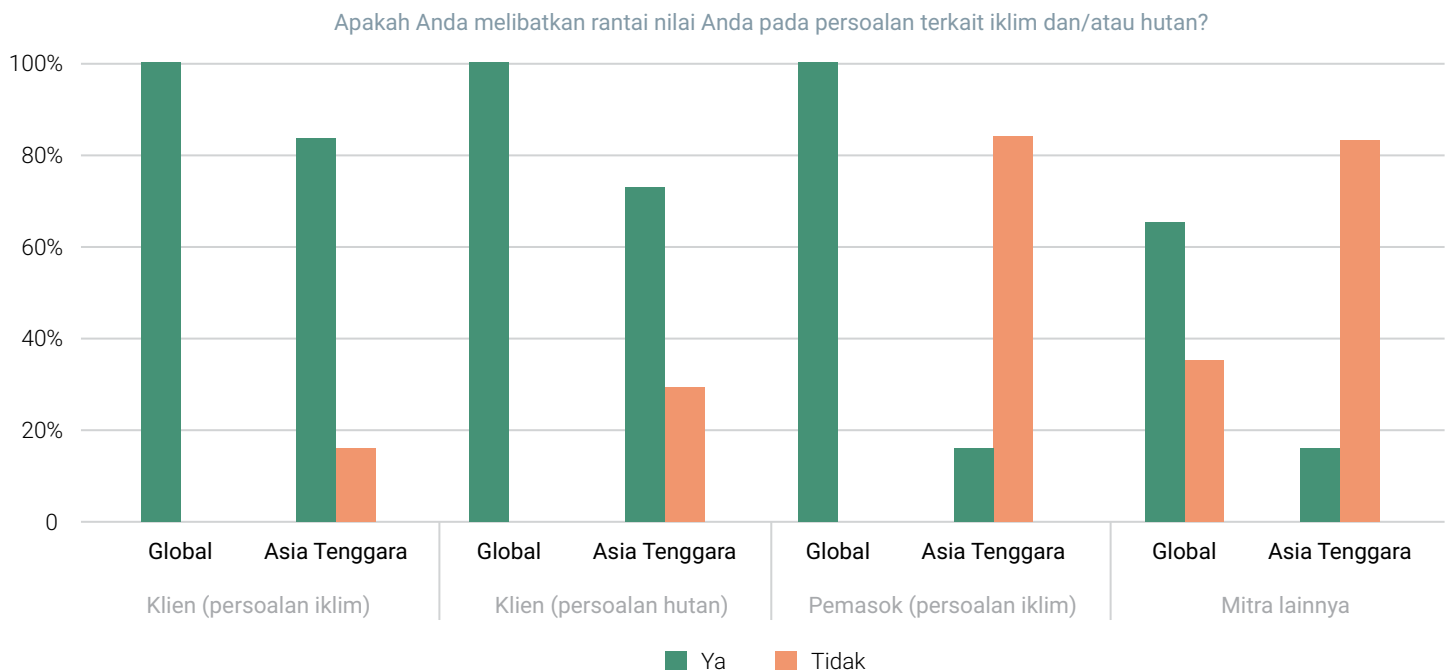


Pelibatan Rantai Nilai

Persyaratan untuk melibatkan pemangku kepentingan³⁵ dalam rantai pasok komoditas yang merisikokan hutan dimandatkan dalam SUSBA, Prinsip Perbankan yang Bertanggung Jawab (*Principles for Responsible Banking*), P.OJK No.51/2017, VBIAF oleh BNM, dan Panduan Pengelolaan Risiko Lingkungan (*Environmental Risk Management Guidelines*) oleh MAS.

Semua bank global melibatkan pemasoknya, dan 67% di antaranya juga melibatkan mitra lain dalam rantai nilainya, sementara bank Asia Tenggara hanya 14%. Dengan distribusi yang serupa, semua bank global melibatkan kliennya pada persoalan terkait iklim dan hutan, sementara bank Asia Tenggara hanya 86% (iklim) dan 71% (hutan). Analisis ini menunjukkan bahwa bank Asia Tenggara harus lebih banyak melibatkan pemasok dan mitra lainnya dalam rantai pasok komoditas yang merisikokan hutan. Meningkatnya kapasitas dan pemahaman mengenai risiko dan dampak portofolio adalah langkah awal yang penting.

Gambar 4: Pelibatan di dalam rantai pasok pada persoalan terkait iklim dan/atau hutan





TINDAKAN YANG DILAKUKAN BANK ASIA TENGGARA TERKAIT RISIKO IKLIM DAN HUTAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dihasilkan tiga rekomendasi kebijakan teratas untuk mendorong regulasi keuangan berkelanjutan yang baru dan lebih baik di Asia Tenggara. Rekomendasi ini ditujukan pada tiga negara Asia Tenggara yang menjadi fokus, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Namun demikian, mengingat semakin banyaknya data yang diperoleh dari bank di Indonesia dan Malaysia, terdapat rekomendasi tambahan yang bersifat khusus bagi pembuat kebijakan dan lembaga keuangan di Indonesia dan Malaysia.

Rekomendasi kebijakan

1 Meningkatkan adopsi dan implementasi pertimbangan iklim dan penjaagaan hutan dalam regulasi, termasuk melalui pelibatan rantai nilai

Regulator memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap bank. Para regulator di Asia Tenggara harus mengintegrasikan pertimbangan iklim dan penjaagaan hutan dalam regulasi pasar, pengawasan, dan regulasi kehati-hatian.

Indonesia	Malaysia
<ul style="list-style-type: none">Indonesia harus melanjutkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II dan memperluas ketentuan untuk pelibatan rantai nilai.	<ul style="list-style-type: none">Malaysia melalui JC3 harus mengembangkan peta jalan dan rencana aksi yang menguraikan tindakan mereka menuju ekonomi rendah karbon. Rencana ini harus menjabarkan cara lembaga keuangan di Malaysia melibatkan klien dalam rantai pasok komoditas yang merisikokan hutan guna mendorong tindakan berkelanjutan dan pelaporan yang lebih ambisius.

2 Memastikan dipenuhinya persyaratan pengungkapan wajib untuk meningkatkan transparansi lembaga keuangan dan dampak lingkungan dari perusahaan publik terkait komoditas yang merisikokan hutan

Guna meningkatkan pemahaman dan analisis risiko dan peluang terkait iklim, dibutuhkan data dan informasi dengan kualitas yang baik untuk mendukung keputusan investasi atas dasar informasi. Data yang lebih baik juga akan membantu investor melibatkan perusahaan terkait ketahanan strateginya, yang dapat membantu mendorong peralihan yang lebih halus menuju ekonomi rendah karbon³⁶. Pengungkapan yang berkualitas adalah hal utama untuk memperoleh data yang lebih baik. TCFD memberikan rekomendasi kerangka terstandarisasi untuk pengungkapan iklim mengingat pencakupan mereka yang komprehensif berfokus pada dampak keuangan dan dukungan industri yang kuat.

Indonesia	Malaysia
<ul style="list-style-type: none">Regulasi pengungkapan wajib sudah ada, namun diperlukan adanya peningkatan kualitas pengungkapan dan penyesuaian dengan persyaratan TCFD.	<ul style="list-style-type: none">Meskipun TCFD sudah direkomendasikan oleh BNM, pengungkapan lingkungan wajib dilakukan untuk memantau kinerja bank.

3 Meningkatkan kapasitas bank Asia Tenggara dalam hal pemahaman dan pengukuran risiko terkait iklim dan hutan dalam portofolio pemberian pinjamannya

Bank Asia Tenggara memiliki kapasitas yang rendah untuk cukup memahami, mengukur, dan mengintegrasikan risiko dan dampak terkait iklim dan hutan dalam portofolio pemberian pinjamannya, termasuk untuk emisi yang tercakup dalam Scope 3. Data dan pemahaman yang lebih baik akan memungkinkan bank mengembangkan dan mengimplementasikan penjagaan, serta lebih mengintegrasikan risiko ke dalam proses pengambilan keputusan. Regulator dapat mengirimkan sinyal kebijakan yang jelas dan tindakan insentif untuk kinerja keuangan yang berkelanjutan (*green finance*), termasuk pengembangan dan implementasi taksonomi hijau yang selaras dengan yurisdiksi lainnya di tingkat regional dan internasional. Diciptakannya suatu bahasa umum untuk mengategorikan kegiatan ekonomi berdasarkan dampaknya terhadap deforestasi dan perubahan iklim akan membantu memfasilitasi aliran keuangan untuk kegiatan yang mendukung peralihan menuju ekonomi rendah karbon.

Indonesia	Malaysia
<ul style="list-style-type: none">▼ Diperlukan adanya sosialisasi dan penjelasan yang lebih luas mengenai cara mengintegrasikan regulasi keuangan berkelanjutan OJK ke dalam portofolio pemberian pinjaman bank. Pedoman teknis yang jelas harus dimasukkan dalam Taksonomi Hijau yang akan dikembangkan, yang menjabarkan tindakan khusus yang diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam sektor jasa keuangan. Guna memastikan pertanyaan sektor swasta ditanggapi, konsultasi publik perlu dilaksanakan sebelum pengembangan taksonomi.	<ul style="list-style-type: none">▼ Panduan mengenai Perubahan Iklim dan Taksonomi berbasis Prinsip termutakhir serta VBIAF dengan panduan sektoral mengenai kelapa sawit, energi terbarukan, dan efisiensi energi perlu disosialisasikan secara luas di seluruh sektor keuangan. JC3 harus memasukkan sosialisasi dan pengembangan kapasitas ini dalam peta jalannya.





DAFTAR PUSTAKA

- 1 Lonnqvist, C., Mehrotra, R., Gillespy, M., & Power, J. (30 Juli 2020). Increasing Transparency of Banks: The Transition to Sustainable Lending to the Forest Risk Commodity Sector. CDP. <https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/005/316/original/CDP-SEA-banks-pilot-executive-summary.pdf?1596042488>.
- 2 Ununiversity. Unraveling the drivers of Southeast Asia's biodiversity loss. United Nations University. <https://unu.edu/publications/articles/unraveling-the-drivers-of-southeast-asia-biodiversity-loss.html#info>.
- 3 World Economic Forum Annual Meeting Davos 2020. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2020>.
- 4 Mahowald1, N. M., Ward2, D. S., Doney3, S. C., Hess4, P. G., & Randerson5, J. T. (18 September 2017). IOPscience. Environmental Research Letters. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa836d>.
- 5 Ununiversity. Unraveling the drivers of Southeast Asia's biodiversity loss. United Nations University. <https://unu.edu/publications/articles/unraveling-the-drivers-of-southeast-asia-biodiversity-loss.html#info>.
- 6 Ununiversity. Unraveling the drivers of Southeast Asia's biodiversity loss. United Nations University. <https://unu.edu/publications/articles/unraveling-the-drivers-of-southeast-asia-biodiversity-loss.html#info>.
- 7 Pacheco P, Gnych S, Dermawan A, Komarudin H, dan Okarda B. 2017. The palm oil global value chain: Implications for economic growth and social and environmental sustainability. Working Paper 220. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- 8 Wilmar International, Musim Mas, and Golden Agri Resources
- 9 WWF, & GEF. (2018). Commodity Market Intelligence Update No. 2 Issue feature: Palm Oil . Good Growth Partnership. <https://goodgrowthpartnership.com/wp-content/uploads/CommodityMarketIntelligenceUpdate-II-Palm.pdf>.
- 10 ASEAN. (29 April 2020). Report on Promoting Sustainable Finance in ASEAN. ASEAN. <https://asean.org/storage/2012/05/Report-on-Promoting-Sustainable-Finance-in-ASEAN-for-AFCDM-AFMGM.pdf>.
- 11 Membership. Banque de France. (15 Desember 2020). <https://www.ngfs.net/en/about-us/membership>.
- 12 Roadmap for Sustainable Finance in Indonesia. OJK. (Desember 2014). <https://www.ojk.go.id/Files/box/keuangan-berkelanjutan/roadmap-keuangan-berkelanjutan.pdf>.
- 13 Prasyida, Y. (14 April 2020). Explainer: The progress and challenges of sustainable financing in Indonesia. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/14/explainer-the-progress-and-challenges-of-sustainable-financing-in-indonesia.html>.
- 14 Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-(2021-2025). Publikasi. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-\(2021-2025\).aspx](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-(2021-2025).aspx).
- 15 Iskandar, Y. (7 Januari 2021). Sustainable finance and banks: Building momentum for change. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/academia/2021/01/06/sustainable-finance-and-banks-building-momentum-for-change.html>.
- 16 Amanda, P. (Februari 2019). Green bonds in Indonesia: Prospects and challenges. Pefindo. <https://pefindo.com/fileman/file/743>.
- 17 Sustainable Finance Roadmap Phase II (2021-2025). OJK. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-%282021-2025%29/Roadmap%20Kuangan%20Berkelanjutan%20Tahap%20II%20%282021-2025%29.pdf>.
- 18 Sukuk merujuk pada sertifikat yang bernilai sama, yang membuktikan kepemilikan atau investasi tak terbagi atas aset, dengan menerapkan prinsip dan konsep syariah yang disahkan oleh Dewan Penasihat Syariah Malaysia.
- 19 SC Introduces Sustainable and Responsible Investment Sukuk framework - Media Releases and Announcements. Securities Commission Malaysia. <https://www.sc.com.my/resources/media-releases-and-announcements/sc-introduces-sustainable-and-responsible-investment-sukuk-framework>.
- 20 Bank Negara, SC lead new committee on climate change. Edgeprop.my. <https://www.edgeprop.my/content/1592674/bank-negara-sc-lead-new-committee-climate-change?wref=edgemarkets>.
- 21 Issues Papers. www.iaisweb.org. <https://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/issues-papers/file/88991/issues-paper-on-the-implementation-of-the-tcfd-recommendations>.
- 22 Central Banking Newsdesk 21 Oct 2020. (21 Oktober 2020). Malaysia's central bank to launch climate taxonomy in 2021. Central Banking. <https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/7700446/malysias-central-bank-to-launch-climate-taxonomy-in-2021>.
- 23 Navigation. Value-based Intermediation Financing and Investment Impact Assessment Framework - Guidance Document - Bank Negara Malaysia. <https://www.bnm.gov.my/-/value-based-intermediation-financing-and-investment-impact-assessment-framework-guidance-document>.
- 24 Call for Public Feedback on The VBIAF Sectoral Guides on Palm Oil, Renewable Energy and Energy Efficiency. AIBIM. <https://aibim.com/news/call-for-public-feedback-on-the-vbiaf-sectoral-guides>.
- 25 Bursa Malaysia Reinforces Support of TCFD Recommendations in Updated Sustainability Reporting Guide and Toolkits. Bursa Malaysia. https://www.bursamalaysia.com/about_bursa/media_centre/bursa-malaysia-reinforces-support-of-tcfd-recommendations-in-updated-sustainability-reporting-guide-and-toolkits.
- 26 Corporate and sustainability reporting in Singapore and Southeast Asia. WBCSD. https://docs.wbcsd.org/2018/10/Corporate_and_sustainability_reporting_in_Singapore_and_Southeast_Asia.pdf.
- 27 "Harnessing the Power of Finance for a Sustainable Future"- Pidato Utama oleh Mr Ravi Menon, Direktur Pengelola, MAS, pada Konferensi Financial Times Investing for Good Asia Digital pada 13 Oktober 2020. Monetary Authority of Singapore. <https://www.mas.gov.sg/news/speeches/2020/harnessing-the-power-of-finance-for-a-sustainable-future>.
- 28 Sustainable Bond Grant Scheme. Monetary Authority of Singapore. <https://www.mas.gov.sg/schemes-and-initiatives/sustainable-bond-grant-scheme>.
- 29 Supporters. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. <https://www.fsb-tcfd.org/supporters/>.
- 30 Uhrynyk, M., & Burdulia, A. W. (16 Desember 2020). Singapore Regulator Issues Environmental Risk Management Guidelines for Asset Managers and Other Financial Institutions. Lexology. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5d0409b6-67bb-4d66-aca1-b3bdc2f4d291>.
- 31 Guidelines on Environmental Risk Management (Banks). Monetary Authority of Singapore. (Desember 2020). <https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Commercial-Banks/Regulations-Guidance-and-Licensing/Guidelines/Guidelines-on-Environmental-Risk---Banks/Guidelines-on-Environmental-Risk-Management-for-Banks.pdf>.
- 32 Guidelines on Environmental Risk Management (Asset Managers). Monetary Authority of Singapore. (Desember 2020). <https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Securities-Futures-and-Fund-Management/Regulations-Guidance-and-Licensing/Guidelines/Guidelines-on-Environmental-Risk-Management-for-Asset-Managers.pdf>.
- 33 Guidelines on Environmental Risk Management (Insurers) . Monetary Authority of Singapore. (Desember 2020). <https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-and-Licensing/Insurance/Regulations-Guidance-and-Licensing/Guidelines/Guidelines-on-Environmental-Risk-Management-Insurers.pdf>.
- 34 Guidelines on Reporting Climate-related Information. European Commission. (2019). https://ec.europa.eu/finance/docs/policy/190618-climate-related-information-reporting-guidelines_en.pdf.
- 35 Environmental Protection Agency. (31 Desember 2020). Scope 3 Inventory Guidance. EPA. <https://www.epa.gov/climateleadership/scope-3-inventory-guidance>.
- 36 Issues Papers. www.iaisweb.org. <https://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/issues-papers/file/88991/issues-paper-on-the-implementation-of-the-tcfd-recommendations>.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

CDP Policy Engagement:

Pieter Bertazzi

Global Director, Policy Engagement
pieter.bertazzi@cdp.net

Nur Maliki Arifiandi

Policy Engagement Manager, Forests
nur.arifiandi@cdp.net

Helen Finlay

Senior Global Policy Manager, Forests
helen.finlay@cdp.net

CDP Forests:

Sareh Forouzes

Associate Director, Forests
sareh.forouzes@cdp.net

Tomasz Sawicki

Project Manager Forests
tomasz.sawicki@cdp.net

CDP Worldwide

Level 4
60 Great Tower Street
London EC3R 5AD
Tel: +44 (0) 20 3818 3900
www.cdp.net



Tentang CDP

CDP adalah organisasi nirlaba internasional yang menggerakkan sistem pengungkapan lingkungan bagi perusahaan dan pemerintah. Didirikan di tahun 2000, CDP bekerjasama dengan 590 investor yang memiliki aset 110 triliun Dolar AS, CDP merupakan pionir yang menggunakan pasar modal dan pengadaan perusahaan untuk memotivasi perusahaan dalam mengungkapkan dampak lingkungannya, dan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan perlindungan sumber air dan perlindungan hutan. Lebih dari 10.000 perusahaan diseluruh dunia mengungkapkan data lingkungan melalui CDP pada tahun 2020, termasuk lebih dari 9.600 perusahaan atau setara lebih dari 50% kapitalisasi pasar global, lebih dari 940 kota, provinsi dan kabupaten yang mewakili kombinasi populasi lebih dari 2,6 milyar penduduk. CDP sepenuhnya sejalan dengan TCFD, kami memegang kumpulan data lingkungan terbesar di dunia, dan penilaian CDP digunakan secara luas untuk mendorong keputusan penanaman modal dan pembelian yang menuju nol (zero) karbon, ekonomi yang berkelanjutan dan Tangguh. CDP adalah salah satu pendiri dari Science Based Target Initiative, We Mean Business Coalition, The Investor and the Net Zero Asset Managers Initiative.

Kunjungi <https://cdp.net/en> atau ikuti kami di @CDP untuk informasi lebih lanjut